

ABSTRAK

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan pendiri yang dipisahkan. Selain itu, sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumber-sumber lain. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa sumber-sumber kekayaan Yayasan juga dapat diperoleh dari: sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat’ diartikan sebagai sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari Negara, masyarakat maupun dari pihak lain. Penelitian ini dijalankan untuk menganalisa problematika yang timbul dari kedudukan aset yayasan yang berasal dari bantuan Negara serta mencari solusi dari problematika yang timbul.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data primer didapatkan menggunakan metode tinjauan lapangan (field research) sedangkan data sekunder melalui tinjauan kepustakaan (library research). Pada akhirnya, data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepengurusan yayasan masih dipengaruhi oleh struktur birokrasi jika dilihat dari susunan personalia Pembina, Pengurus dan Pengawas yang terdiri dari mantan pejabat Pemda dan Kemenag Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat dipahami dari latar belakang berdirinya yayasan. Sedangkan problem aset yayasan ialah lahan seluas 40.035 m² yang tercatat dalam sertifikat No. 41/1997 dan terletak di desa Kertawinangun yang merupakan tanah desa. Tanah ini diperoleh melalui proses tukar guling dengan tanah hasil pembelian di desa Dawuan. Tanah di desa Dawuan adalah milik masyarakat dibeli oleh yayasan dengan menggunakan dana dari masyarakat, kemudian dijual dan uangnya diserahkan kepada Pemerintah Desa Kertawinangun untuk mencari tanah penggantinya. Dengan demikian aset yayasan tersebut bukanlah berasal dari bantuan Negara, melainkan dari hasil swadaya masyarakat. Sebagai solusi untuk mengatasi problem aset yayasan ini, Pengurus segera melangkah ke BPN untuk mengkonfirmasi permasalahan. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui landasan hukum pemberian hak atas tanah kepada Yayasan. Adapun solusi problem aset berupa bangunan, baik yang dibangun dengan biaya dari hibah, bantuan Negara maupun swadaya masyarakat, maka Yayasan perlu mengidentifikasi bangunan-bangunan yang berasal dari bantuan Negara dan bangunan-bangunan yang berasal dari swadaya masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui partisipasi masyarakat sekaligus mengetahui tingkat kemandirian Yayasan. Untuk mengantisipasi terjadinya problematika ini, disarankan agar lembaga-lembaga yang mendapat bantuan dari Pemerintah membuat laporan ganda, yang pertama ditujukan kepada Pemerintah sebagai pertanggungjawaban dan kedua ditujukan kepada Yayasan sebagai laporan.

Kata Kunci: Yayasan, Aset Yayasan, Bantuan Negara.

ABSTRACT

A foundation is a legal entity consisting of separated assets of the founder. In addition, the source of the foundation's wealth can be obtained from other sources. Based on the Foundation Law, it is stated that the sources of the Foundation's assets can also be obtained from: donations that are not binding, waqf, grants, testament grants, and other acquisitions that do not conflict with the articles of association or the prevailing laws and regulations. 'Donations that are not binding' are defined as voluntary donations or assistance received by a foundation, whether from the government, the community or from other parties. This research was conducted to analyze the problems arising from the position of the foundation's assets originating from the government and to find solutions to the problems that arise.

The method used in this research is normative juridical which is descriptive-analytical. Primary data is collected using field research methods, while secondary data is collected through library research. Finally, the collected data were analyzed by qualitative method.

The results of this study indicate that the management of the foundation is still influenced by the bureaucratic structure when viewed from the composition of the personnel of founders, administrators and supervisors consisting of former local government officials and the Ministry of Religion of Cirebon Regency. This can be understood from the background of the foundation's establishment. Meanwhile, the foundation's assets problem is the land of 40,035 m² in certificate No. 41/1997 and located in the village of Kertawinangun which is government land. This land was obtained through a swap process with land purchased in Dawuan village. The land in Dawuan Village belongs to the community and purchased by the foundation using the funds collected from the community, then sold and the money is handed over to the Kertawinangun Village Government to find replacement land. Thus, the foundation's assets do not come from government, but from non-governmental organizations. As a solution to the foundation's asset problems, the management immediately come to BPN office to solve the problem. This action is considered important to know the legal basis for granting land rights to the Foundation. As for the solution to the problem of assets in the form of buildings, both those built with funding from grants, government donations and non-governmental organizations, the Foundation needs to identify buildings that come from government donations and buildings that come from non-governmental organizations. This is considered important to determine community participation as well as to know the level of independence of the Foundation. To anticipate this problematic case, it is recommended that the institutions that receive donation from the government make multiple reports, the first is aimed at the Government as accountability and the second is addressed to the Foundation as a report.

Keywords: Foundation, Foundation Asset, Government Donation.